

## **BAB II**

### **TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Suhardi dan Inasius (2015) tentang Analisis Penerapan Aplikasi *E-Filing* Dalam Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara menunjukkan bahwa sistem *e-filing* tidak mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Persentase pelaporan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2013 secara manual 28,85% pada tahun 2014 sebesar 31,60%, sedangkan menggunakan sistem *e-filing* tahun 2013 sebesar 0,10% pada tahun 2014 sebesar 2,10%. Wajib pajak orang pribadi masih banyak melaporkan SPT Tahunan secara manual daripada dengan sistem *e-filing*.

Hasil penelitian Tumuli, Sondakh, dan Wokas (2016) tentang Analisis Penerapan *E-SPT* dan *E-Filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu saat wajib pajak melapor dengan tepat waktu menggunakan *e-SPT* dan *e-filing* mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Selain itu, kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-SPT* dan *e-filing* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado.

Hasil penelitian Akib dan Amdayani (2015) tentang Analisis Penerapan Sistem *E-Filing* Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* melalui website DJP belum berjalan secara efektif dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut terbukti bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari mencatat hingga tahun pajak 2014, kontribusi pengguna *e-filing* tercatat hanya sebesar 3,94%, selebihnya sebesar 96,06% wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara manual kepada KPP Pratama Kendari. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kendari sebelum dan sesudah penerapan sistem *e-filing* melalui website DJP yang disebabkan karena belum efektifnya penerapan sistem *e-filing* tersebut.

Penelitian-penelitian di atas meneliti tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fasilitas tersebut seperti sistem *e-filing* dan *e-SPT*. Sistem *e-filing* dan *e-SPT* merupakan fasilitas yang digunakan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melaporkan SPT. Kemudahan bagi wajib pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut.

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Secara umum, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar yang berasal dari kontribusi atau iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai alat pegangan pemerintah untuk membiayai sebagian besar pengeluaran-pengeluaran negara, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk menjaga dan mengandalkan penerimaan pajak agar sesuai target yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi atau iuran wajib, berupa uang atau barang kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Mardiasmo 2016:3 ; Pandiangan 2014:3).

### **2.2.2 Wajib Pajak**

Wajib pajak merupakan suatu unsur yang terpenting dalam dunia perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak terdiri dari 3 jenis yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak. Wajib pajak orang pribadi merupakan semua orang yang telah memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang

jumlahnya diatas PTKP. Penghasilan tersebut berasal dari hasil sebagai karyawan, profesi, dan melakukan kegiatan usaha. Menurut Mardiasmo (2016:59) terdapat hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, antara lain:

a. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban sebagai wajib pajak, antara lain:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP dan melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai PKP.
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 3) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh.

b. Hak yang diperoleh Wajib Pajak

Hak yang diperoleh wajib pajak, antara lain:

- 1) Mengajukan surat banding dan surat keberatan.
- 2) Menerima tanda bukti memasukkan SPT.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT, pengangsuran pembayaran pajak dan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 5) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- 6) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan saksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

Terdapat istilah wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya berupa menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Wajib Pajak non efektif, Wajib Pajak yang dinyatakan sebagai wajib pajak non efektif jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan.

- e. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan tetapi belum dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak.

### **2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Pandiangan (2014:11), secara umum sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari kantor pajak.

b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. *Withholding System*

*Withholding System* merupakan sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana pelaksana kewajiban wajib pajak dilakukan oleh pihak lain (ketiga) karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut.

### **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

*Self Assessment System* merupakan pemenuhan kewajiban yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga sistem tersebut mendorong wajib pajak untuk aktif, jujur, dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Gunadi (2013:94), kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dan tanpa adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau ancaman dan sanksi baik secara hukum atau administrasi. Menurut Nurmantu (2003:148) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material yaitu sesuai isi dan kandungan di dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2, bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang disebut dengan wajib pajak yang patuh harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- c. Tidak mempunyai tagihan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tagihan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayarannya.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Terdapat indikator kepatuhan pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) yaitu:

- a. Aspek ketepatan waktu, yaitu persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan yaitu pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- d. Aspek lainnya misalkan aspek pembayaran dan aspek pembukuan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Pemahaman terhadap *Self Assessment System*

Sistem *self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem ini akan efektif jika wajib pajak memiliki kedisiplinan, kesadaran, dan kejujuran melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.

- b. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus memberikan kenyamanan, kelancaran, keamanan, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan



meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, demikian juga sebaliknya.

c. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah berpeluang masyarakat enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurang memahami sistem perpajakan yang diterapkan.

d. Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak yang terutang. Selain itu, tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya secara tepat waktu.

e. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Sehingga adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ/2014 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima (tidak termasuk pembetulan SPT

Tahunan PPh) dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh. Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh seluruh Wajib Pajak. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sehingga jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT Tahunan PPh WPOP dan jumlah Wajib Pajak yang digunakan adalah jumlah WPOP efektif.

### **2.2.5 Sistem *E-Filing***

Dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu memberikan fasilitas serta kemudahan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Fasilitas tersebut salah satunya mengenai penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan sistem *e-filing*. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui Website Direktorat Jenderal Pajak, sistem *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak maupun Penyedia Jasa Aplikasi.

*E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *E-filing* digunakan dengan tujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat proses pelaporan SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak karena memakai sistem *online* dan memberikan akses yang mudah. Dengan berbagai kemudahan tersebut, penerapan sistem *e-filing* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dalam penerapan sistem *e-filing*, antara lain:

- a. Memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan SPT.
- b. Menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapanpun dan dimanapun. Hal ini akan mengecilkan biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyampaikan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga jumlah Wajib Pajak diharapkan akan meningkat serta penerimaan negara dapat tercapai dengan baik.

Pihak yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir SPT Tahunan 1770S dan Formulir SPT Tahunan 1770SS. Formulir SPT Tahunan 1770S digunakan oleh wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja, memiliki penghasilan dalam negeri lainnya yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final. Sedangkan Formulir SPT Tahunan 1770SS digunakan WPOP untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan terutang

yang mendapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank atau bunga koperasi, dan maksimum penghasilan sebesar 60.000.000 satu tahun.

Berikut merupakan proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing*:

- a. Mengajukan permohonan *Eletronik Filling Identification Number (e-FIN)* secara tertulis. *E-FIN* merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filing*.
- b. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Wajib Pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan dan *digital certificate* sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
- c. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
  - 1) Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing* di situs DJP.
  - 2) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui *email* atau *SMS*.
  - 3) Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi.
  - 4) Notifikasi status *e-SPT* akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui *email*.

Bukti Penerimaan *e-SPT* terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Keuntungan dalam menggunakan sistem *e-filing*, antara lain:

- a. Murah karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
- b. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja selama 7 hari dan 24 jam.
- c. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;
- d. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
- e. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan
- g. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*.

#### **2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016:35). Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sederhana terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak. Surat Pemberitahuan

(SPT) manual memiliki karakteristik yang berbeda dengan SPT *digital* atau *e-SPT* dalam pelaporan. Karakteristik SPT manual ialah sebagai berikut.

- a. Wajib pajak masih berhubungan langsung dengan petunjuk pajak.
- b. Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP khususnya data lampiran SPT.
- c. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan WP dalam SPT tidak sama dengan yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Perekaman data SPT masih membutuhkan SDM yang banyak.
- e. Pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT.
- f. Pemborosan kertas.

Terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak. Jangka waktu tahun pajak adalah 1 tahun kalender. Sedangkan, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat batas waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, batas waktu maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak yaitu 31 Maret.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, batas waktu maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak

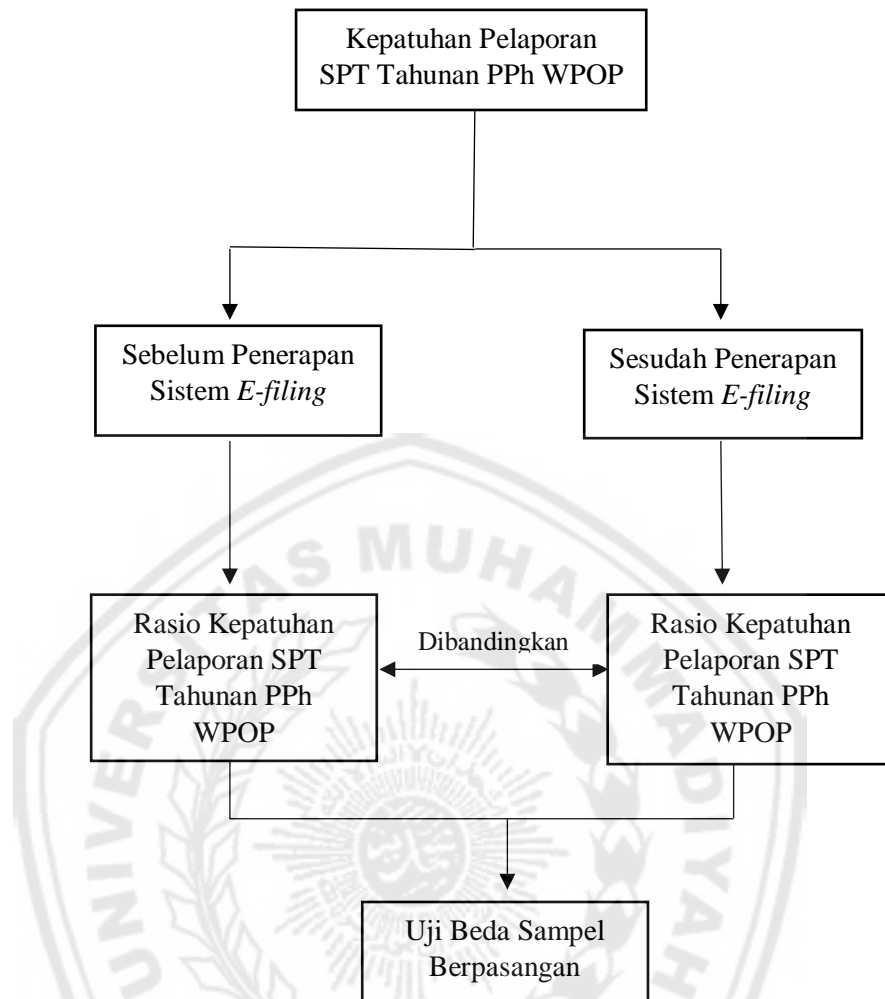
Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

- c. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama penyampaian 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi merupakan hal yang sangat penting dalam sistem *Self Assessment* yang dianut di Indonesia. Saat ini, masih banyak wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dengan tidak melaporkan SPT Tahunan dan tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Dengan adanya permasalahan ini, pihak DJP membuat program baru dengan menerapkan sistem *e-filing* yang terdapat pada *website* DJP.

Sistem *e-filing* memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sehingga diharapkan dengan adanya sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh sebelum dan sesudah penerapan sistem *e-filing* akan dilakukan dengan pengujian statistik berupa uji beda sampel berpasangan (*paired sample t-test*). Skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Perumusan Hipotesis

Direktorat Jenderal Pajak saat ini memberikan fasilitas-fasilitas untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem *E-filing* merupakan sistem yang digunakan wajib pajak agar lebih mudah dan praktis dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Hanya dengan membutuhkan fasilitas internet, wajib pajak sudah bisa menggunakan sistem *e-filing* tersebut. Saat ini, sistem *e-filing* melayani pelaporan dua jenis SPT, yaitu SPT Tahunan PPh formulir 1770S dan SPT Tahunan PPh formulir 1770SS.



Dengan adanya sistem *e-filing* ini, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh. Wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya tidak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya diharapkan akan menjadi patuh dalam melaporkan SPT Tahunan PPh dan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan oleh DJP, karena adanya sistem *e-filing* ini yang semakin mudah digunakan. Penerapan sistem *e-filing* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh yang terdapat di KPP Pratama Batu. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>0</sub>: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebelum dan sesudah penerapan sistem *e-filing*.
- H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebelum dan sesudah penerapan sistem *e-filing*.